



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI KEMENTERIAN KOORINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Nomor: 1/Pansel-JPT-Polhukam/2/2019

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. JPT yang lowong
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Persyaratan umum
 - 1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 30 Mei 2019;
 - 3) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) dan pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan fungsional ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 4) Sekurang-kurangnya telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II atau yang disetarakan, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. I atau yang disetarakan;
 - 5) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 7 (tujuh) tahun;
 - 6) Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang;
 - 8) Memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai;

- 9) Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1), diutamakan Magister/Pascasarjana (S-2);
- 10) Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- 11) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Orang Pribadi 1 (satu) tahun terakhir;
- 13) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- 14) Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp. 6000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Persyaratan khusus

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	Eselon I.a
3.	Unit Kerja	:	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
No	Kompetensi	Level	
1	2	3	
1.	Integritas	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat Nasional (I.5)	
2.	Kerjasama	Menciptakan situasi kerja sama secara konsisten, baik di dalam maupun luar instansi (K.5)	
3.	Komunikasi	Mengagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja (K.5)	
4.	Orientasi pada hasil	Meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi (O.5)	
5.	Pelayanan Publik	Mampu memastikan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok/partai politik (P.5)	

6.	Pengembangan diri dan orang lain	Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil (P.5)
7.	Mengelola perubahan	Memimpin, menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi/nasional (M.5)
8.	Pengambilan Keputusan (PK)	Menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang/strategis, berdampak nasional (PK.5)

STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

1.	Nama Jabatan	:	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
2.	Eselon/Jenjang Jabatan	:	Eselon I.a
3.	Unit Kerja	:	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
No	Kompetensi	Level	
1	2	3	
1.	Perekat Bangsa	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis (PB.5)	

4. Waktu dan Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dimulai tanggal 25 Februari 2019 ditutup pada tanggal 11 Maret 2019;
- b. Surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dikirimkan melalui alamat email **kepeg@polkam.go.id** dengan melampirkan:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup (sesuai dengan format terlampir);
 - 2) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 3) Salinan sah petikan keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - 4) Fotocopy tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - 5) Fotocopy tanda bukti penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)/pelunasan kewajiban pajak tahun 2017;
 - 6) Salinan sah penilaian prestasi kerja/daftar penilaian Perwira, dua tahun terakhir;

- 7) Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (tautan contoh Surat Persetujuan terlampir);
 - 8) Salinan sah ijazah yang dipersyaratkan;
 - 9) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 10) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 11) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;
 - 12) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.
- c. Surat lamaran beserta lampirannya (dalam bentuk *hardcopy*) sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, juga dikirimkan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Ruang Bagian Kepegawaian, Gedung B, Lantai 6, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jln. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat 10110, dan sudah harus diterima Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.00 WIB;
- d. Untuk tahapan seleksi akan diumumkan lebih lanjut melalui situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, www.polkam.go.id
5. Ketentuan Lain-Lain
- a. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar.
 - b. Panitia Seleksi tidak melayani surat-menyurat dan korespondensi lainnya.
 - c. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 25 Februari 2019

Ketua Panitia Seleksi,



Agus S.B., M.I.Kom.